



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI KAMIS, 13 AGUSTUS 2026

RINGKASAN BERITA HARI INI

Ketua H. Abdillah Naah Wakil Ketua Suyarno, S.H., M.H. H. Kayan, SH Wakil Ketua Warih Andono, SE



Suasana setelah pengukuhan 254 kepala SDN dan SMPN oleh Bupati Sidoarjo Subandi di Pendopo Delta Wibawa.

254 Kepala SDN dan SMPN Dikukuhkan

Bupati Sidoarjo Minta Mereka Cegah Anak Putus Sekolah

SIDOARJO - HARIAN BANGSA Bupati Sidoarjo Subandi mengukuhkan 254 kepala SDN dan SMPN hasil mutasi dan promosi, Rabu 12 Agustus 2026. Bupati meminta mereka memastikan tidak ada anak putus sekolah karena alasan ekonomi.

Pengukuhan berlangsung di Pendopo Delta Wibawa dan dihadiri ratusan kepala sekolah

gung jawab memimpin satuan pendidikan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sidoarjo.

Jabatan kepala sekolah bukanlah tempat mencari kenyamanan, melainkan ruang untuk menunjukkan kinerja terbaik dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sumber daya manusia.

"Bapak dan Ibu kepala sekolah, ingatkan bahwa jabatan ini bukan sekadar posisi, melainkan amanah sebagai pemimpin pembelajaran, penggerak budaya positif, dan penentu arah perubahan," ujarnya.

Bupati menegaskan, sekolah

Kabupaten Sidoarjo. Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2025-2030 adalah "Mena Desa, Membangun Kota: Menuju Sidoarjo Metropolitan Inklusif, Berdaya Saing, Sejahtera, Dan Berkelanjutan". Visi dan misi itu, lanjutnya, hanya dapat terwujud dengan sumber daya manusia yang kuat dan berkualitas.

"Peran kepala sekolah di sini membentuk generasi masa depan melalui pendidikan yang inklusif, transparan, dan akuntabel," jelasnya.

Bupati meminta seluruh kepala sekolah mendukung program prioritas Pemerintah

Sambut HUT RI ke 81 Tarif Trans Jatim Mulai Rp81

SURABAYA-AP

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggandeng Bank Indonesia (BI) menghadirkan promo tarif Trans Jatim dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selama 11-17 Agustus 2026, masyarakat dapat menikmati tarif perjalanan mulai Rp81 melalui pembayaran QRIS.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong penggunaan transportasi publik sekaligus memperluas transaksi digital di masyarakat.

"Ini kado kemerdekaan untuk masyarakat Jawa Timur. Silakan dinikmati dan dimanfaatkan program potongan tarif Trans Jatim selama sepekan ini," ujar Khofifah saat mengikuti misi dagang di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (11/8/2026).

Dalam program tersebut, penumpang yang menggunakan QRIS Tap cukup membayar Rp81 untuk sekali perjalanan. Sementara penumpang



Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat naik Trans Jatim.

Rp475 untuk sekali perjalanan.

Khofifah menjelaskan, angka 81 dipilih sebagai simbol usia Kemerdekaan Republik Indonesia

Semakin mudah, aman dan nyaman layanannya, kita berharap semakin banyak masyarakat yang memilih transportasi publik." katanya

kuota promo setiap hari sebanyak 3.135 tiket untuk transaksi menggunakan QRIS Dinamis dan 221 tiket untuk QRIS Statis.

BPK Temukan Kelebihan Bayar Rp 566,4 Juta di Proyek Alun-Alun

Legislator Minta Uang Dikembalikan

SIDOARJO - Proyek revitalisasi Alun-alun Sidoarjo memang sudah selesai. Namun, pekerjaan senilai Rp25,7 miliar tersebut masih menyisakan persoalan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan pembayaran mencapai Rp 566,4 juta.

Temuan tersebut mendapat atensi DPRD Sidoarjo. Setelah meminta uang dikembalikan,

sa, kemudian masih ditemukan kelebihan pembayaran. Benar proses pengawasannya yang perlu dievaluasi," katanya kemarin (12/8).

Pejabat DPRD Sidoarjo Iswadi mengaku telah mendakarkannya ke pertemuan BPK.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan kekurangan pemeriksaan, termasuk kewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran. "Jadi kami sudah lanjut sesuai rekomendasi BPK," ujarnya. (ful/hen)

254 Kepala Sekolah Dilantik, 86 Jabatan Masih Kosong

Pengisian Terkendala Sistem di MyASN

SIDOARJO - Sebanyak 254 kepala sekolah (kepsek) SD negeri dan SMP negeri dilantik di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo kemarin (12/8). Namun, pekerjaan rumah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo masih belum tuntas. Sebanyak 86 sekolah masih belum memiliki kepala sekolah definitif.

Plt Kepala Dikbud Sidoarjo Netti Lastiningsih mengatakan, dari 254 kepsek yang dikukuhkan, 227 merupakan kepala SD negeri. Rinciannya, 90 orang mendapat promosi dan 137 lainnya melalui mutasi. Sementara itu, ada 27 kepala SMP ne-

PEMENUHAN KEPALA SEKOLAH SD DAN SMP

- Kepsek yang dikukuhkan 254 orang
- Rinciannya 227 kepsek SD dan 27 SMP
- 86 jabatan kepsek masih kosong
- Proses pengisian masih terhambat MyASN

Sumber: Dinas Dikbud Sidoarjo
GRAFIK: ADITYA JAWA POS

geri yang dikukuhkan.

Meski ratusan posisi telah terisi, Netti menyebut masih ada 86 sekolah yang belum memiliki kepsek. Rinciannya, 82 SD negeri dan empat SMP negeri. "Pengisian jabatan kepsek tidak bisa dilakukan sekaligus.



SIAP BEKERJA: Para kepala sekolah baru akan langsung bertugas setelah dilantik di Pendopo Delta Wibawa kemarin (12/8).

Masih ada sejumlah tahapan administrasi dan proses kepegawaian yang harus diselesaikan," katanya.

Awasi Program Sekolah

Untuk calon kepsek hasil promosi, misalnya, mereka harus melewati beberapa tahapan seleksi, termasuk wawancara, sebelum hasil-

nya diproses oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK). Selain itu, proses pengisian juga masih harus melalui sejumlah sistem kepegawaian. Di antaranya aplikasi KSPSTK milik Dikdasmen dan sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kendala juga muncul pada sistem MyASN. Netti menyebut pihaknya sebenar-

nya telah menyiapkan proses pengisian, tetapi masih terdapat persoalan. "Memang sudah kami siapkan. Namun, ada kendala di MyASN-nya," imbuhnya.

Dikbud Sidoarjo pun masih berupaya agar puluhan sekolah yang belum memiliki kepsek segera terisi. Sebab, kekosongan jabatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menyangkut pengelolaan sekolah sehari-hari.

Bupati Sidoarjo Subandi berharap pengukuhan 254 kepsek dapat mengurangi kekosongan yang selama ini terjadi. Terlebih, sejumlah sekolah telah cukup lama menunggu pengisian jabatan tersebut. "Kami meminta kepsek ikut mengawasi program sekolah," katanya. (ful/hen)



Suasana setelah pengukuhan 254 kepala SDN dan SMPN oleh Bupati Sidoarjo Subandi di Pendopo Delta Wibawa.

254 Kepala SDN dan SMPN Dikukuhkan

Bupati Sidoarjo Minta Mereka Cegah Anak Putus Sekolah

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Bupati Sidoarjo Subandi mengukuhkan 254 kepala SDN dan SMPN hasil mutasi dan promosi, Rabu 12 Agustus 2026. Bupati meminta mereka memastikan tidak ada anak putus sekolah karena alasan ekonomi

Pengukuhan berlangsung di Pendopo Delta Wibawa dan dihadiri ratusan kepala sekolah serta pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sidoarjo.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Bupati Subandi mengucapkan selamat atas amanah yang diemban para kepala sekolah. Ia berpesan, kepala sekolah harus mampu memegang teguh tang-

gung jawab memimpin satuan pendidikan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sidoarjo.

Jabatan kepala sekolah bukanlah tempat mencari kenyamanan, melainkan ruang untuk menunjukkan kinerja terbaik dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sumber daya manusia.

“Bapak dan Ibu kepala sekolah, ingatlah bahwa jabatan ini bukan sekadar posisi, melainkan amanah sebagai pemimpin pembelajaran, penggerak budaya positif, dan penentu arah perubahan,” ujarnya.

Bupati menegaskan, sekolah maju lahir dari kepemimpinan yang mampu menggerakkan guru, memastikan setiap anak mendapat pendidikan bermutu, serta membangun lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak-anak didik.

Ia menyampaikan bahwa sekolah merupakan bagian penting dari pembangunan

Kabupaten Sidoarjo. Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2025–2030 adalah “Menata Desa, Membangun Kota: Menuju Sidoarjo Metropolitan Inklusif, Berdaya Saing, Sejahtera, Dan Berkelanjutan”. Visi dan misi itu, lanjutnya, hanya dapat terwujud dengan sumber daya manusia yang kuat dan berkualitas. “Peran kepala sekolah di sini, membentuk generasi masa depan melalui pendidikan yang inklusif, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.

Bupati meminta seluruh kepala sekolah mendukung program prioritas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, salah satunya program 20.000 beasiswa pendidikan. Kepala sekolah harus memastikan tidak ada anak Sidoarjo yang putus sekolah karena alasan ekonomi. “Pemerintah daerah berkomitmen pada program prioritas, termasuk 20.000 beasiswa pendidikan,” tegasnya. (md/rus)

CS | dipindai dengan CamScanner

254 Kepala Sekolah Dilantik, 86 Jabatan Masih Kosong

Pengisian Terkendala
Sistem di MyASN

SIDOARJO – Sebanyak 254 kepala sekolah (kepsek) SD negeri dan SMP negeri dilantik di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo kemarin (12/8). Namun, pekerjaan rumah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo masih belum tuntas. Sebanyak 86 sekolah masih belum memiliki kepala sekolah definitif.

Plt Kepala Dikbud Sidoarjo Netti Lastiningsih mengatakan, dari 254 kepsek yang dikukuhkan, 227 merupakan kepala SD negeri. Rinciannya, 90 orang mendapat promosi dan 137 lainnya melalui mutasi. Sementara itu, ada 27 kepala SMP ne-

PEMENUHAN KEPALA SEKOLAH SD DAN SMP

- Kepsek yang dikukuhkan **254** orang
- Rinciannya 227 kepsek SD dan 27 SMP
- 86 jabatan kepsek masih kosong
- Proses pengisian masih terhambat MyASN

Sumber: Dinas Dikbud Sidoarjo
GRAFIS: ADIT/JAWA POS

geri yang dikukuhkan.

Meski ratusan posisi telah terisi, Netti menyebut masih ada 86 sekolah yang belum memiliki kepsek. Rinciannya, 82 SD negeri dan empat SMP negeri. "Pengisian jabatan kepsek tidak bisa dilakukan sekaligus.



SIAP BEKERJA: Para kepala sekolah baru akan langsung bertugas setelah dilantik di Pendopo Delta Wibawa kemarin (12/8).

Masih ada sejumlah tahapan administrasi dan proses kepegawaian yang harus diselesaikan," katanya.

Awasi Program Sekolah

Untuk calon kepsek hasil promosi, misalnya, mereka harus melewati beberapa tahapan seleksi, termasuk wawancara, sebelum hasil-

nya diproses oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK). Selain itu, proses pengisian juga masih harus melalui sejumlah sistem kepegawaian. Di antaranya aplikasi KS-PSTK milik Dikdasmen dan sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kendala juga muncul pada sistem MyASN. Netti menyebut pihaknya sebenar-

nya telah menyiapkan proses pengisian, tetapi masih terdapat persoalan. "Memang sudah kami siapkan. Namun, ada kendala di MyASN-nya," imbuhnya.

Dikbud Sidoarjo pun masih berupaya agar puluhan sekolah yang belum memiliki kepsek segera terisi. Sebab, kekosongan jabatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menyangkut pengelolaan sekolah sehari-hari.

Bupati Sidoarjo Subandi berharap pengukuhan 254 kepsek dapat mengurangi kekosongan yang selama ini terjadi. Terlebih, sejumlah sekolah telah cukup lama menunggu pengisian jabatan tersebut. "Kami meminta kepsek ikut mengawasi program sekolah," katanya. (ful/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Wabup Dorong Pelayanan Penghuni Rusunawa Pucang Dimaksimalkan

Sidoarjo, Memorandum

Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana sidak ke Rusunawa Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Senin (10/8). Dalam kesempatan itu, ia meminta pelayanan dan fasilitas hunian bertingkat itu dimaksimalkan.

Dalam inspeksi mendadak itu, ia melihat langsung kondisi tiga bangunan Rusunawa Pucang. Masing-masing gedung A, B dan C. Mulai kondisi bangunan, kebersihan lingkungan, fasilitas umum, pelayanan kepada penghuni, hingga keamanan diamati.

Mimik juga berdialog dengan sejumlah penghuni. Mereka menyampaikan berbagai keluhan terkait pengelolaan rusunawa yang berada di bawah kewenangan Dinas

Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (P2CKTR) Sidoarjo tersebut.

Dikatakan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus hadir untuk memastikan penghuni rusunawa memperoleh pelayanan yang layak. Para penghuni setiap bulan telah membayar biaya sewa sesuai ketentuan. Itu tugas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Memastikan penghuni rusunawa ini mendapatkan haknya.

“Karena mereka sudah membayar setiap bulan, haknya harus terpenuhi, seperti fasilitas umum dan kebersihan di lingkungan masing-masing,” pintanya.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah minimnya tenaga kebersihan. Mimik

menyebut, tiga gedung yang masing-masing terdiri atas lima lantai hanya ditangani oleh dua petugas kebersihan.

“Kondisi kebersihan sangat tidak layak. Tiga gedung mulai lantai satu sampai lantai lima hanya diurus dua orang tenaga kebersihan. Halamannya kotor dan penuh sampah,” tegasnya.

Menurut Mimik, kondisi tersebut harus segera mendapatkan penanganan. Selain kebersihan, sejumlah fasilitas lain juga perlu dibenahi. Terutama penerangan, keamanan, serta kondisi atap bangunan yang mengalami kebocoran.

Mimik mengatakan akan segera berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk meru-

muskan langkah perbaikan. Pemasangan CCTV juga jadi salah satu usulan untuk meningkatkan keamanan penghuni rusunawa.

“Yang segera kita usulkan adalah perbaikan fasilitas, terutama penerangan, kebersihan dan CCTV untuk keamanan. Ada juga gedung yang bocor, sehingga harus segera dilakukan pembenahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” jelasnya.

Rusunawa Pucang memiliki tiga gedung dengan total 297 ruangan. Saat ini tercatat sebanyak 226 keluarga menjadi penghuni. Tingkat hunian mencapai sekitar 85 persen. Biaya sewa dibayar penghuni berbeda, berdasar lantai yang ditempati. Untuk unit di

lantai bawah, tarif sewanya mencapai Rp545 ribu per bulan. Itu sudah termasuk biaya listrik dan air.

Mimik juga menyoroti pengelolaan pendapatan dari sewa rusunawa. Berdasarkan data yang disampaikan, hingga Juni 2026, pendapatan dari lima rusunawa di Kabupaten Sidoarjo telah mencapai sekitar Rp7,3 miliar.

Menurut Mimik, pendapatan itu semestinya bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung biaya pemeliharaan, perawatan, maupun renovasi rusunawa. “Pendapatan dari rusunawa ini harus dikembalikan untuk biaya renovasi atau perawatan agar pelayanan kepada penghuni bisa optimal,” ujarnya. (jok/fdn)

CS

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Serapan Tenaga Kerja Lokal Masih Minim

Dari 52.061 Pekerja,
Hanya 23.257
Ber-KTP Sidoarjo



Jangan hanya sekadar
imbauan, tapi malah
praktiknya
diabaikan."

Supriyono
Jubir Fraksi Gerindra
DPRD Sidoarjo

SIDOARJO - Banyaknya industri di Sidoarjo belum sepenuhnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal. Data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo menunjukkan, jumlah pekerja dari luar daerah masih lebih banyak dibandingkan warga asli Sidoarjo.

Kepala Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Sidoarjo Yulita Indah Prasetiari mengungkapkan, total pekerja men-

capai 52.061 orang. Dari angka tersebut, ada 23.257 yang ber-KTP Sidoarjo. Sisanya



BAHAS KETENAGAKERJAAN: DPRD mengkritik Raperda Tenaga Kerja dalam paripurna, Selasa (11/8).

merupakan pendatang.

"Memang masih banyak yang dari luar daerah," kata Yulita. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam rapat paripurna pembahasan Raperda Penyelenggaraan Tenaga Kerja Selasa (11/8) sore.

Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo Supriyono mengatakan, penyerapan tenaga kerja lokal perlu mendapat perhatian lebih serius. Menurutnya, keberadaan industri

yang mencapai 1.230 belum otomatis membuat angkatan kerja Sidoarjo terserap secara optimal. Karena itu, raperda dinilai perlu memuat ketentuan yang lebih kuat terkait prioritas tenaga kerja lokal.

Perusahaan tidak cukup hanya diimbau untuk mengutamakan warga Sidoarjo, tetapi perlu ada target yang lebih terukur. "Jangan hanya sekadar imbauan, tapi malah praktiknya diabaikan," katanya. Me-

nurut Supriyono, persoalan penyerapan tenaga kerja juga berkaitan dengan ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan perguruan tinggi tercatat mencapai 7,68 persen. Sedangkan lulusan SMP mencapai 7,56 persen. "Disnaker harus bisa memetakan bagaimana supaya mereka terserap industri," ujar Supriyono. (ful/hen)

Jawa Pos

Bupati dan Kades Balongdowo Dipanggil PTUN Pekan Depan



DIKRY SANSIRI/RADAR SIDOARJO

LANJUTAN: Sidang Pilkades Balongdowo, Candi, Sidoarjo, terus bergulir di PTUN Surabaya, Rabu (12/8).

■ Sidang Pilkades Balongdowo Terus Bergulir

KOTA-Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Balongdowo, Kecamatan Candi, Sidoarjo, terus bergulir. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya akan memanggil Bupati Sidoarjo Subandi dan Kepala Desa Balongdowo Muhammad Yatim dalam sidang lanjutan, Rabu (19/8) mendatang.

Pemanggilan tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan

perkara gugatan yang diajukan Calon Kepala Desa (Cakades) Balongdowo Suparlan. Gugatan itu berkaitan dengan dugaan cacat hukum dalam proses penetapan Muhammad Yatim sebagai calon kepala desa terpilih.

Sidang lanjutan digelar di PTUN Surabaya, Rabu (12/8) pagi. Agenda persidangan masih sebatas pemeriksaan

● Ke Halaman 10

FENOMENA

Bupati dan Kades...

dan pemberkasan administrasi. Kuasa hukum Suparlan, Djupri, mengatakan sejumlah dokumen telah disiapkan dan diserahkan dalam persidangan.

Di antaranya Surat Keputusan (SK) pembentukan panitia Pilkades, SK terkait panitia, serta SK dari Bupati Sidoarjo. “Masih lanjutan dari perkara terdahulu. Tadi masih pemberkasan persiapan,” kata Djupri.

Menurutnya, tidak terdapat persoalan terkait berkas yang diajukan pihak

penggugat. Dokumen tersebut telah diterima oleh majelis hakim.

Untuk sidang berikutnya, majelis hakim dijadwalkan memanggil dua pihak tergugat, yakni Bupati Sidoarjo Subandi dan Kades Balongdowo Muhammad Yatim. “Hari ini Pak Bupati belum bisa hadir. Untuk panggilannya Pak Bupati dan Pak Yatim, kepala desa,” ujarnya.

Sementara itu, Cakades Balongdowo Suparlan menegaskan pihaknya tetap mendasarkan gugatan pada aturan yang dinilai berkaitan langsung dengan

persoalan tersebut. Ia menyebut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026, khususnya Pasal 42 ayat 4, menjadi salah satu dasar utama yang digunakan dalam gugatan.

Menurut Suparlan, ketentuan tersebut diduga tidak dilaksanakan dalam proses Pilkades Balongdowo. Pihaknya juga mengaku memiliki sejumlah alat bukti pendukung untuk memperkuat dalil gugatan.

“Sebetulnya banyak alat-alat bukti pendukung. Kami mengacu pada PP 16, Pasal 42 ayat 4. Itu yang utama

karena menurut kami tidak dilaksanakan,” kata Suparlan.

Di sisi lain, Ketua Panitia Pilkades Balongdowo Lambang membenarkan bahwa sidang pada Rabu (12/8) masih berupa pemeriksaan berkas.

Ia menyebut terdapat tiga pihak tergugat yang dipanggil dalam persidangan. Namun, hanya dua pihak yang hadir, yakni ketua panitia dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sementara pihak dari Bupati Sidoarjo belum dapat hadir. “Masih pemeriksaan. Masih pemeriksaan ber-

kas saja. Nanti kami akan kembali lagi tanggal 19 hari Rabu,” ujarnya.

Lambang menjelaskan, kehadiran pihak panitia dalam persidangan belum sampai pada tahap pemberian keterangan mengenai substansi perkara. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap pihaknya hanya berkaitan dengan identitas dan kesesuaian dengan surat panggilan persidangan.

“Cuma memeriksa identitas saja, sesuai dengan panggilan. Yang lebih banyak tadi dari pihak penggugat,” jelasnya. (dik/vga)

CS



Pemkab Sidoarjo Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Ekosistem Mangrove

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Pemkab Sidoarjo bersama Pemerintah Kabupaten/Kota Pesisir Pantai Utara Jawa menyatakan komitmennya untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.

Deklarasi tersebut dibacakan dalam rangkaian Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Peluncuran Program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove, di Balai Sidang Universitas Indonesia, Senin (10/8).

Kegiatan itu menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir, sekaligus menjaga kelestarian dan pemanfaatan ekosistem mangrove secara berkelanjutan.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan terbangun kesepahaman dan komitmen bersama antarpemangku kepentingan, serta menghasilkan langkah tindak lanjut dalam mengembangkan model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekosistem mangrove.

Para kepala daerah yang hadir menegaskan bahwa ekosistem mangrove tidak hanya penting sebagai benteng alami pantai, tetapi juga sebagai fondasi ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.

“Melalui deklarasi ini kami berkomitmen menjadikan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai fondasi pembangunan masyarakat pesisir yang inklusif, produktif, tangguh, dan berkelanjutan,” kata Bupati Sidoarjo Subandi.

Ada lima poin komitmen bersama yang disepakati para kepala daerah dalam pertemuan itu. Pertama, komitmen memperkuat pemberdayaan inklusif dan partisipatif : melalui pendataan kelompok sasaran, pemetaan potensi, peningkatan kapasitas, pendampingan usaha, hingga penguatan peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dan pelestarian mangrove. Kedua, mendorong ekonomi berkelanjutan berbasis mangrove : dengan mengoptimalkan potensi silvofishery, perikanan berkelanjutan, produk olahan hasil laut dan mangrove, hasil hutan bukan kayu, ekowisata, serta UMKM lokal yang bernilai tambah dan berdaya saing. (md/rus)



Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Peluncuran Program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove, di Balai Sidang Universitas Indonesia.

CS berkolaborasi dengan camScanner



TERISI: 254 kepala sekolah SDN dan SMPN dilantik Bupati Sidoarjo Subandi di Pendapa Delta Wibawa, Rabu (12/8).

254 Kepala Sekolah SD-SMP Negeri Dikukuhkan

KOTA-Sebanyak 254 kepala sekolah (kepsek) SD Negeri dan SMP Negeri di Kabupaten Sidoarjo resmi dikukuhkan Bupati Sidoarjo Subandi, Rabu (12/8). Pengukuhan ini menjadi langkah Pemkab Sidoarjo untuk

mengisi kekosongan jabatan yang selama ini terjadi sekaligus memperkuat kepemimpinan di satuan pendidikan.

Namun, pengisian jabatan tersebut belum sepenuhnya tuntas. Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sidoarjo mencatat masih ada 86 posisi kepala sekolah yang kosong, terdiri atas 82 jabatan kepala SD Negeri dan empat jabatan kepala SMP Negeri. Pengukuhan 254 kepala

sekolah tersebut berlangsung di Pendapa Delta Wibawa Sidoarjo. Mereka merupakan hasil proses promosi dan mutasi kepala sekolah serta tenaga pendidik di jenjang SD Negeri

● Ke Halaman 10

CS

RADAR
SIDOARJO.ID

254 Kepala Sekolah...

dan SMP Negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 80 orang mendapat promosi sebagai kepala SD Negeri, 12 orang promosi sebagai kepala SMP Negeri, serta 15 orang menjalani mutasi sebagai kepala SMP Negeri. Sementara sisanya merupakan kepala SD Negeri yang mengalami mutasi atau rotasi.

Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kabupaten Sidoarjo. "Jabatan kepala sekolah bukanlah tempat mencari kenya-

manan, melainkan ruang untuk menunjukkan kinerja terbaik dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sumber daya manusia," tegas Subandi.

Dia meminta seluruh kepala sekolah yang baru dikukuhkan mampu menjadi pemimpin pembelajaran, penggerak budaya positif, sekaligus penentu arah perubahan di sekolah masing-masing.

Khusus kepala sekolah yang mendapat promosi, Subandi juga memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan anggaran serta pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah melalui sistem swakelola.

Menurutnya, kepala sekolah harus berani mengambil tanggung jawab dan

tidak mudah terintervensi pihak lain dalam pelaksanaan proyek sekolah.

"Jangan mau disetir oleh siapa pun atau pihak lain. Karena ini swakelola, tanggung jawab ada di tangan panjenengan (kepala sekolah)," ujarnya.

Subandi mengingatkan, kepala sekolah akan menjadi pihak yang bertanggung jawab apabila pelaksanaan pembangunan maupun rehabilitasi sekolah tidak berjalan sesuai ketentuan.

Langkah tersebut sekaligus untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak yang mencoba mendatangi sekolah dan memaksakan kehendak dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi maupun pembangunan sarana dan pra-

sarana pendidikan.

Untuk mencegah kepala sekolah terdampak persoalan hukum akibat ketidaktahuan mengenai mekanisme pelaksanaan program, Pemkab Sidoarjo menyiapkan pendampingan dari Inspektorat. Kepala sekolah yang masih belum memahami mekanisme pelaksanaan pembangunan maupun rehabilitasi sekolah dipersilakan mengajukan pendampingan.

"Kalau masih ada kurang pemahaman, silakan minta pendampingan ke Inspektorat. Biar teman-teman kepala sekolah bisa menjalankan program perbaikan sekolah dengan baik dan selesai tanpa ada unsur masalah dengan apa-

rat penegak hukum," kata Subandi.

Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dikbud Kabupaten Sidoarjo Netti Lastiningsih mengungkapkan, pengisian jabatan kepala sekolah belum sepenuhnya selesai. Masih terdapat 86 posisi yang kosong, yakni 82 kepala SD Negeri dan empat kepala SMP Negeri.

Netti menjelaskan, proses pengisian jabatan dilakukan secara bertahap dan transparan. Untuk jalur promosi, calon kepala sekolah telah melewati sejumlah tahapan, mulai seleksi administrasi hingga wawancara sebelum dinyatakan lolos oleh Tim Penilai Kinerja (TPK) atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). (dik/vga)

CS

RADAR
SIDOARJO.ID



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pertalite untuk Warga Kaya dan Sangat Kaya Bakal Dibatasi Bertahap

Bahlil: Motor
Tak Ada
Pembatasan

JAKARTA - Pemerintah mulai menyiapkan skema pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) Pertalite bagi kelompok ma-

syarakat berpenghasilan atas. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, pembatasan tersebut tengah

dikaji dan berpotensi menyasar masyarakat pada kelompok desil 9-10 (*lihat grafis pembagian desil*) ■

Baca *Pertalite...* Hal 2

Jawa Pos

Pertalite untuk Warga Kaya dan Sangat Kaya Bakal Dibatasi Bertahap

Sambungan dari Hal 1

Purbaya mengatakan, kebijakan tersebut tidak akan langsung diterapkan. "Pemerintah masih mempersiapkan sistem agar pembatasan subsidi bisa dilakukan secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan," kata Purbaya di Jakarta kemarin (12/8).

Dia menilai, sistem Pertamina saat ini sudah cukup baik untuk mendukung pelaksanaan pembatasan subsidi. Namun, pemerintah belum menetapkan waktu pasti penerapan kebijakan tersebut.

Dalam skema yang tengah dikaji, masyarakat yang masuk kelompok desil 9-10 nantinya tidak lagi dapat membeli Pertalite bersubsidi. Mereka akan diarahkan menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamax.

Purbaya menegaskan, pembahasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengendalikan belanja subsidi agar tidak membebani Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, lanjut dia, saat ini fokus memastikan kondisi APBN tetap aman.

Menyikapi rencana itu, peneliti makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia Teuku Riefky menilai, secara desain, Pertalite seharusnya memang ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Kelompok tersebut umumnya berada pada desil 1 hingga 4.

Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan. "Potensi kebocoran tetap ada karena pemerintah akan menghadapi tantangan dalam mengontrol dan memastikan penerima BBM bersubsidi benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan," kata Riefky.

Terkait potensi penghematan anggaran, Riefky belum dapat memperkirakan berapa banyak. Dia menambahkan, skema subsidi langsung kepada masyarakat penerima akan lebih

ideal dibandingkan subsidi pada produk BBM. Salah satu bentuknya adalah bantuan langsung tunai.

Subsidi Tepat Sasaran
Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan sepeda motor atau kendaraan roda dua masih diperbolehkan membeli BBM bersubsidi seperti biasa. Bahlil mengatakan, pembahasan subsidi tepat sasaran dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Dia mengakui Pertalite selama ini masih dapat dinikmati masyarakat dari kelompok ekonomi atas. Senada dengan Airlangga, Bahlil juga menyebut, pemerintah saat ini masih membahas mekanisme penyaluran subsidi tersebut bersama kementerian terkait.

"Tujuannya agar anggaran subsidi BBM dapat lebih tepat sasaran," katanya. (mim/bry/ttg)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pertalite untuk Warga Kaya dan Sangat Kaya Bakal Dibatasi Bertahap

Bahlil: Motor
Tak Ada
Pembatasan

JAKARTA - Pemerintah mulai menyiapkan skema pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) Pertalite bagi kelompok ma-

syarakat berpenghasilan atas. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, pembatasan tersebut tengah

dikaji dan berpotensi menyasar masyarakat pada kelompok desil 9-10 (*lihat grafis pembagian desil*) ■

Baca *Pertalite...* Hal 2

Jawa Pos

Pertalite untuk Warga Kaya dan Sangat Kaya Bakal Dibatasi Bertahap

Sambungan dari Hal 1

Purbaya mengatakan, kebijakan tersebut tidak akan langsung diterapkan. "Pemerintah masih mempersiapkan sistem agar pembatasan subsidi bisa dilakukan secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan," kata Purbaya di Jakarta kemarin (12/8).

Dia menilai, sistem Pertamina saat ini sudah cukup baik untuk mendukung pelaksanaan pembatasan subsidi. Namun, pemerintah belum menetapkan waktu pasti penerapan kebijakan tersebut.

Dalam skema yang tengah dikaji, masyarakat yang masuk kelompok desil 9-10 nantinya tidak lagi dapat membeli Pertalite bersubsidi. Mereka akan diarahkan menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamax.

Purbaya menegaskan, pembahasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengendalikan belanja subsidi agar tidak membebani Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, lanjut dia, saat ini fokus memastikan kondisi APBN tetap aman.

Menyikapi rencana itu, peneliti makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia Teuku Riefky menilai, secara desain, Pertalite seharusnya memang ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Kelompok tersebut umumnya berada pada desil 1 hingga 4.

Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan. "Potensi kebocoran tetap ada karena pemerintah akan menghadapi tantangan dalam mengontrol dan memastikan penerima BBM bersubsidi benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan," kata Riefky.

Terkait potensi penghematan anggaran, Riefky belum dapat memperkirakan berapa banyak. Dia menambahkan, skema subsidi langsung kepada masyarakat penerima akan lebih

ideal dibandingkan subsidi pada produk BBM. Salah satu bentuknya adalah bantuan langsung tunai.

Subsidi Tepat Sasaran
Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan sepeda motor atau kendaraan roda dua masih diperbolehkan membeli BBM bersubsidi seperti biasa. Bahlil mengatakan, pembahasan subsidi tepat sasaran dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Dia mengakui Pertalite selama ini masih dapat dinikmati masyarakat dari kelompok ekonomi atas. Senada dengan Airlangga, Bahlil juga menyebut, pemerintah saat ini masih membahas mekanisme penyaluran subsidi tersebut bersama kementerian terkait.

"Tujuannya agar anggaran subsidi BBM dapat lebih tepat sasaran," katanya. (mim/bry/ttg)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sidoarjo Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Ekosistem Mangrove

Sidoarjo, Memorandum

Pemkab Sidoarjo bersama Pemerintah Kabupaten/Kota Pesisir Pantai Utara Jawa menyatakan komitmennya untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.

Deklarasi tersebut dibacakan dalam rangkaian Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Peluncuran Program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove, di Balai Sidang Universitas Indonesia, Senin (10/8).

Kegiatan itu menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir, sekaligus menjaga kelestarian dan pemanfaatan ekosistem mangrove secara berkelanjutan.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan terbangun kesepahaman dan komitmen bersama

antarpemangku kepentingan, serta menghasilkan langkah tindak lanjut dalam mengembangkan model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekosistem mangrove.

Para kepala daerah yang hadir menegaskan bahwa ekosistem mangrove tidak hanya penting sebagai benteng alami pantai, tetapi juga sebagai fondasi ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.

"Melalui deklarasi ini kami berkomitmen menjadikan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai fondasi pembangunan masyarakat pesisir yang inklusif, produktif, tangguh, dan berke-



Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Peluncuran Program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove, di Balai Sidang Universitas Indonesia.

lanjutan," kata Bupati Sidoarjo Subandi.

Ada lima poin komitmen bersama yang disepakati para

kepala daerah dalam pertemuan itu. Pertama, komitmen memperkuat pemberdayaan inklusif dan partisipatif: me-

lalui pendataan kelompok sasaran, pemetaan potensi, peningkatan kapasitas, pendampingan usaha, hingga

penguatan peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dan pelestarian mangrove.

Kedua, mendorong ekonomi berkelanjutan berbasis mangrove: dengan mengoptimalkan potensi silvofishery, perikanan berkelanjutan, produk olahan hasil laut dan mangrove, hasil hutan bukan kayu, ekowisata, serta UMKM lokal yang bernilai tambah dan berdaya saing.

Ketiga, memperkuat kelembagaan dan ekonomi lokal: melalui pengembangan kelompok usaha, koperasi, BUM Desa/BUM Desa Bersama agar mampu membangun kemitraan, mengakses pembiayaan, dan mengelola usaha secara profesional.

Keempat, meningkatkan sinergi multipihak: dengan dukungan kebijakan, riset,

inovasi, investasi, teknologi, akses pasar, hingga tanggung jawab sosial lingkungan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat pesisir yang mandiri dan sejahtera.

Kelima, menyusun dan memantau rencana aksi bersama: menetapkan prioritas wilayah, sasaran penerima manfaat, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi berkala agar dampaknya nyata dan berkelanjutan.

Pemkab Sidoarjo meyakini, dengan kolaborasi erat, inovasi, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, ekosistem mangrove tidak hanya akan lestari. Lebih dari itu, mangrove akan menjadi sumber kesejahteraan, ketahanan ekonomi, dan warisan berharga bagi generasi saat ini dan mendatang. (Jok/fdn)





MOBIL DILARANG MELINTAS: Papan "Ada Kegiatan" dipasang untuk menghalau roda empat masuk ke jalan RW 01, Kemas.

Betonisasi Picu Kemacetan Jalan Kampung

SIDOARJO – Warga yang tinggal di RW 01, Kemas, Krian, mengeluh. Gara-gara proyek betonisasi di Jalan Embong Kali, banyak kendaraan masuk ke lingkungan tempat tinggal mereka. Dampaknya, jalan kampung yang ukurannya hanya tiga meter jadi macet dan semrawut.

Rizky, salah seorang warga, mengatakan kondisi tersebut mulai terjadi dalam sepekan terakhir. Kemacetan paling parah terjadi ketika kendaraan dari arah Jalan Embong Kali dan Jalan Raya Kemas sama-sama mencari jalur alternatif. "Sela-sela (11/8) sore, macet parah. Banyak pengendara mengeluh," kata Rizky kemarin (12/8).

Dia mengatakan, warga RW 01 berharap ada pengaturan lalu lintas selama proyek betonisasi berlangsung. Kendaraan roda empat dan kendaraan besar diharapkan diarahkan melalui jalur alternatif yang memang memiliki kapasitas lebih memadai.

Kanit Lantas Polsek Krian AKP Indra Arliansyah mengatakan, polisi akan menindaklanjuti keluhan warga. "Kami coba nanti arahkan mobil cari jalur alternatif sebelum masuk Jalan Embong Kali," katanya. (eza/hen)

Jawa Pos



ANGGER BONDAN/JAWA POS

WASPADA: Kemunculan buaya muara di Sungai Embong Malang membuat pemilik perahu lebih berhati-hati saat melintas.

Sering Berjemur di Tepi Sungai Embong Malang, Dua Buaya Bikin Resah Warga

SIDOARJO – Masyarakat yang beraktivitas di sekitar Sungai Embong Malang dan Sidokare diresahkan dengan kemunculan buaya muara. Ada dua buaya yang sering kali muncul dan berjemur di pinggir sungai.

Iwan, salah seorang pengemudi perahu mengatakan, buaya muncul dalam dua pekan terakhir. "Ada yang sudah mengambil videonya. Ukurannya memang besar," kata Iwan.

Pria 30 tahun itu pernah melihat ada dua buaya dengan ukuran berbeda berkeliaran di sungai yang bermuara ke Kepetingan, Buduran. "Itu sekitar dua hari yang lalu. Saya lihat ada buaya bere-nang saat naik perahu ke Kepetingan," katanya.

Meski begitu, Iwan mengatakan bahwa buaya belum pernah masuk ke permukiman. Mereka takut dan cenderung bersembunyi saat melihat perahu melintas. (eza/hen)

CS
Siprinda dengan CamScanner

Jawa Pos

Sambut HUT RI ke 81 Tarif Trans Jatim Mulai Rp81

SURABAYA-AP

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggandeng Bank Indonesia (BI) menghadirkan promo tarif Trans Jatim dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selama 11-17 Agustus 2026, masyarakat dapat menikmati tarif perjalanan mulai Rp81 melalui pembayaran QRIS.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong penggunaan transportasi publik sekaligus memperluas transaksi digital di masyarakat.

"Ini kado kemerdekaan untuk masyarakat Jawa Timur. Silakan dinikmati dan dimanfaatkan program potongan tarif Trans Jatim selama sepekan ini," ujar Khofifah saat mengikuti misi dagang di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (11/8/2026).

Dalam program tersebut, penumpang yang menggunakan QRIS Tap cukup membayar Rp81 untuk sekali perjalanan. Sementara pengguna QRIS Dinamis mendapat potongan sebesar 81 persen dari tarif normal.

Dengan diskon tersebut, penumpang umum hanya dikenakan tarif Rp950. Sedangkan pelajar, santri, dan mahasiswa cukup membayar



Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat naik Trans Jatim.

Rp475 untuk sekali perjalanan.

Khofifah menjelaskan, angka 81 dipilih sebagai simbol usia Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Program tersebut sekaligus diharapkan mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan transportasi umum dan sistem pembayaran non-tunai.

"Transportasi publik dan digitalisasi harus berjalan beriringan.

Semakin mudah, aman dan nyaman layanannya, kita berharap semakin banyak masyarakat yang memilih transportasi publik," katanya.

Promo berlaku pada seluruh layanan Trans Jatim di kawasan Gerbangkertosusila dan Malang Raya, kecuali Trans Jatim Luxury. Program ini juga menjadi bagian dari Pekan QRIS Nasional 2026.

Pemprov Jatim mencatat

kuota promo setiap hari sebanyak 3.135 tiket untuk transaksi menggunakan QRIS Dinamis dan 221 tiket untuk QRIS Tap.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemprov Jatim berharap konektivitas antardaerah semakin kuat, penggunaan transportasi umum meningkat, serta inklusi keuangan digital di Jawa Timur semakin luas. (Ibank)

CS
Diproduksi dengan CamScanner





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



BERMASALAH: DPRD menyoroti proses pengawasan revitalisasi alun-alun yang menyebabkan kelebihan bayar hingga Rp 566,4 juta.

CS

Jawa Pos

BPK Temukan Kelebihan Bayar Rp 566,4 Juta di Proyek Alun-Alun

Legislatur Minta
Uang Dikembalikan

SIDOARJO – Proyek revitalisasi Alun-alun Sidoarjo memang sudah selesai. Namun, pekerjaan senilai sekitar Rp 26,7 miliar tersebut masih menyisakan persoalan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan pembayaran mencapai Rp 566,4 juta.

Temuan tersebut mendapat atensi DPRD Sidoarjo. Selain meminta uang dikembalikan,

legislatur mempertanyakan bagaimana pekerjaan yang sudah dinyatakan selesai masih bisa menyisakan koreksi hingga ratusan juta rupiah.

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat mengatakan, temuan tersebut harus dilihat dari proses pengawasan sejak pekerjaan dimulai hingga serah terima. Pengawasan semestinya memastikan pekerjaan yang dibayarkan benar-benar sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak. "Kalau sudah dinyatakan sele-

sai, kemudian masih ditemukan kelebihan pembayaran, berarti proses pengawasannya yang perlu dievaluasi," katanya kemarin (12/8).

Plt Kepala DLHK Sidoarjo Iswadi mengaku telah menindaklanjuti temuan BPK. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan rekomendasi pemeriksaan, termasuk kewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran. "Sudah kami tindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK," ujarnya. (ful/hen)

Herwanto Sukses Budi Daya Tanaman Kumis Kucing di Sidoarjo Kini Rangkul 10 Petani Jadi Mitra

Pekarangan rumah Herwanto sudah berubah menjadi ladang obat herbal dan lahan pekerjaan bagi warga sekitar. Itu sejak area seluas 500 meter di Desa Wonokupang, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo tersebut dipakai budi daya tanaman Kumis Kucing.

HERWANTO merupakan seorang Tenaga Kesehatan (Nakes) TNI Angkatan Laut. Pria berusia 47 tahun tersebut mengawali budi daya Kumis Kucing di pekarangan rumahnya sejak tahun 2025 lalu.

Ide itu muncul dari keprihatinan terhadap melonjaknya kasus gagal ginjal di Indonesia. Sebagai tenaga ke-

KE HALAMAN 11



SURYA/M. TAUFIK

KUMIS KUCING - Herwanto (kiri) saat menerima kunjungan Wabup Sidoarjo Mimik Idayana di lahan budi daya Kumis Kucing di Desa Wonokupang, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, akhir pekan lalu.

Kini Rangkul...

DARI HALAMAN 1

sehatan militer yang terikat sumpah untuk membantu masyarakat, ia tergerak mencari cara pencegahan sederhana berbasis kearifan lokal. "Awalnya kami sangat prihatin dengan persoalan gagal ginjal. Kemudian saya berpikir bagaimana pekarangan bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman yang berkhasiat bagi kesehatan. Dari situlah akhirnya kami putuskan menanam kumis kucing yang memiliki khasiat utama untuk memelihara fungsi ginjal dan saluran kemih," kata Herwanto.

Kumis kucing merupakan tanaman herbal asli

Indonesia. Selain berkhasiat untuk ginjal, juga diyakini bisa membantu meredakan hipertensi, mengontrol kadar gula darah, hingga mengurangi keluhan asam urat dan rematik.

Namun, perjuangan memanfaatkan pekarangan seluas 500 meter persegi di Dusun Girang itu tidak mudah. Dia sempat terkendala oleh sulitnya mendapatkan bibit unggul di awal penanaman. Namun, begitu tumbuh, tanaman obat keluarga (TOGA) ini terbukti relatif mudah dipelihara.

Menurut Herwanto, kumis kucing tergolong tanaman tahan hama sehingga tidak membutuhkan semprotan pestisida sintetis. Perawatannya cukup dengan penyiraman rutin, pembersihan

gulma, dan pemupukan berkala. "Bisa dilihat daunnya mulus tanpa bolong. Tanaman ini aman dari hama tanpa pestisida. Masa panen pertamanya hanya 1,5 bulan setelah tanam, dan setelah itu bisa terus dipanen berkala dengan masa produktivitas tanaman mencapai dua hingga tiga tahun," paparnya.

Dari lahan pekarangan tersebut, Herwanto mampu memanen ratusan kilogram daun basah. Proses pengolahannya dilakukan secara higienis. Daun dan batang muda pilihan dicuci bersih, dicacah, lalu dijemur hingga kering sebelum dikemas menjadi racikan teh herbal siap seduh.

Meski demikian, Herwanto mengingatkan bahwa

konsumsi herbal berfungsi sebagai terapi pendamping untuk menjaga kesehatan dan bukan pengganti pengobatan medis utama, terutama bagi pasien dengan indikasi penyakit kronis.

Selain bermanfaat untuk kesehatan masyarakat, lahan itu juga sudah bertransformasi menjadi unit usaha berbasis pemberdayaan masyarakat. Seluruh alur produksi, mulai dari pemanenan, pencucian, pemotongan, penjemuran, hingga pengemasan produk, semua melibatkan tetangga dan warga sekitar Desa Wonokupang. "Kami ingin usaha ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga membuka lapangan kerja. Warga

sekitar yang memotong, mencuci, dan menjemur mendapatkan tambahan penghasilan dari sini," tutur Herwanto.

Tak berhenti di pekarangan sendiri, Herwanto kini merangkul sedikitnya 10 petani mitra. Setiap bulannya, ia menampung sekitar 700 hingga 800 kilogram daun kumis kucing basah yang sudah dicacah dari para petani dengan harga Rp 3.000 per kilogram.

Melihat besarnya permintaan pasar terhadap produk teh herbal, Herwanto terus membuka kesempatan kemitraan bagi petani maupun agen pemasar di berbagai daerah. "Modal awal budidaya biasanya sudah kembali dalam setengah hingga satu tahun. Dua tahun

berikutnya petani tinggal menikmati keuntungan karena tanaman terus berproduksi," jelasnya.

Keberhasilan itu juga menarik perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana meninjau langsung kebun dan fasilitas pengolahan teh daun kumis kucing di Desa Wonokupang, beberapa waktu lalu.

Dalam kunjungan, Wabup Mimik turut memanen daun kumis kucing dan menyeduh langsung produk teh buatan Herwanto. Ia memberikan apresiasi tinggi atas langkah mandiri prajurit TNI AL tersebut dalam menghidupkan lahan tidur menjadi sumber ekonomi kreatif. "Ini contoh nyata pemanfaatan lahan-peka-

rangan yang tidak produktif menjadi bernilai ekonomis tinggi. Pemanfaatannya pun mudah, cukup diseduh dan khasiatnya langsung terasa untuk tubuh," ujar Mimik.

Mimik mendorong agar Desa Wonokupang dapat dikembangkan menjadi percontohan desa UMKM berbasis tanaman herbal di Sidoarjo. Pemerintah daerah berharap gerakan ini menular ke desa-desa lain yang masih memiliki banyak lahan terlantar. "Ayo desa-desa lainnya ikut mencontoh. Daripada lahan di desa dibiarkan kosong tak berfungsi, lebih baik ditanami tanaman herbal seperti kumis kucing. Selain bikin sehat, perputaran ekonomi desa juga pasti makin cepat," ujarnya. (m. taufik).



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

254 Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri di Sidoarjo Resmi Dikukuhkan



KaMedia – Sebanyak 254 kepala sekolah SD Negeri dan SMP Negeri di Kabupaten Sidoarjo resmi dikukuhkan pada Selasa (12/8/2026). Pengukuhan dilakukan langsung oleh Bupati Sidoarjo Subandi. Pengukuhan tersebut mencakup kepala sekolah yang mendapatkan jabatan melalui promosi maupun mutasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 90 kepala sekolah SD Negeri dikukuhkan melalui jalur promosi. Sementara di tingkat SMP Negeri, terdapat 12 kepala sekolah yang dipromosikan dan 15 kepala sekolah lainnya mendapat penugasan melalui mutasi. Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Dr Netti Lastiningsih, M.Pd, mengatakan seluruh proses pengukuhan dilakukan melalui tahapan seleksi yang ketat. Para calon kepala sekolah terlebih dahulu mengikuti seleksi administrasi dan wawancara sebelum dinyatakan lolos verifikasi. "Untuk proses mutasi disusun oleh PPK yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, hingga akhirnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati," ujar Netti. Menurut dia, seluruh data pejabat yang dikukuhkan juga telah diintegrasikan ke dalam aplikasi KSPS-TK milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta aplikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Proses integrasi tersebut dilakukan hingga diterbitkannya Pertimbangan Teknis dari BKN. Bupati Sidoarjo Subandi berharap para kepala sekolah yang baru dikukuhkan dapat segera menjalankan tugas di satuan pendidikan masing-masing. "Saya berharap para kepala sekolah baru ini dapat membawa peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan tempat bertugas," kata Subandi. Dengan pengukuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap roda organisasi di lingkungan SD dan SMP Negeri dapat berjalan lebih efektif. Penataan dan pengisian jabatan ini juga diharapkan dapat mendukung percepatan berbagai program peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bupati Sidoarjo Melarang Sekolah Melaksanakan ODL Berlebihan



SIDOARJO (RadarJatim.id) — Bupati Sidoarjo, H. Subandi, S.H., M.Kn., mewanti-wanti, bahkan melarang para kepala sekolah menggelar kegiatan Outdoor Learning (ODL), atau pembelajaran di luar kelas secara berlebihan. Pelarangan ini ditekankan guna mencegah timbulnya kesenjangan sosial serta beban finansial bagi para wali murid. Pernyataan tersebut disampaikan Subandi di usai acara Pengukuhan 254 Kepala Sekolah SD Negeri dan SMP Negeri di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, pagi Rabu (12/8/2026) pagi. Dalam arahannya, Subandi meminta para kepala sekolah untuk lebih bijak dalam merancang dan menyikapi agenda ODL. Pelaksanaan kegiatan luar ruang harus disesuaikan dengan jenjang usia, kemampuan peserta didik, dan latar belakang ekonomi keluarga. "Kadang-kadang saya kasihan melihat ODL yang tujuannya terlalu jauh. Apalagi jika ada siswa yang keluarganya kurang mampu, ini bisa memicu kesenjangan dan membebani anak-anak serta orang tua," ungkapnya. Ia mencontohkan pelaksanaan studi tur hingga ke luar pulau, seperti ke Bali bagi siswa tingkat SMP, yang dinilai kurang tepat dan berlebihan jika ditinjau dari sisi urgensi maupun kemampuan seluruh siswa. "Saya sarankan untuk jenjang TK, SD, hingga SMP, agar kegiatan ODL difokuskan di dalam daerah atau wilayah terdekat di Jawa Timur, seperti kawasan Malang, atau maksimal ke Yogyakarta," saran Bupati Subandi. Ia juga mengimbau kepada seluruh pihak sekolah agar mengelola program ODL secara matang. "Jadi, tidak terkesan memaksakan destinasi yang jauh, serta memastikan kegiatan tersebut murni bersifat edukatif tanpa memberatkan kondisi perekonomian orang tua murid," pesannya.(mad)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Komisi B Mempercepat RDP Dengan PDAM Delta Tirta



Sidoarjo-cakrajatim.com: Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi B dengan PDAM Delta Tirta, begitu cepat setelah jajaran PDAM yang hadir tidak lengkap. Padahal rapat sangat penting. Yaitu sorotan tajam masyarakat akan Karyawan PDAM Delta Tirta berinisial AA, pecandu narkoba hanya disanksi SP2 oleh management Perumda Delta Tirta Sidoarjo. Komisi B memanggil jajaran Direksi dan Dewas Perumda Delta Tirta untuk RDP. drg Anang Suhari Kembali Mengikuti Putaran Musancab PKB Tulangan Pengangguran Terbuka Menjadi Agenda Serius DPRD Sidoarjo. Dengar pendapat yang digelar pada Rabu (12/8) berjalan beberapa saat saja. H.Bambang Pujiyanto ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, menunda pelaksanaan hearing karena beberapa pejabat penting tidak hadir. "Karena ketua Dewas Perumda Delta Tirta, Kabag Hukum dan Kabag Perekonomian tidak hadir, maka agenda hearing hari ini kita tunda," tutur Bambang singkat. Bambang Pujiyanto mengaku sengaja menutup lebih cepat pelaksanaan hearing, karena tidak mungkin akan ada solusi tanpa kehadiran ketua Dewas. "Kita ingin ada langkah tegas dari ketua Dewas soal masalah ini. Begitu juga dengan Kabag Hukum, yang bisa memberikan paparan hukum soal masalah ini. Jika keduanya tidak hadir, tentu rapat tidak akan maksimal. Kita akan agendakan lagi," ujar Bambang. Sebelumnya terungkap pegawai PDAM Delta Tirta berinisial AA sebagai pecandu narkoba, berawal dari hasil tes urin di Mapolresta Sidoarjo setelah laka tunggal. Hasilnya bersangkutan positif mengonsumsi zat adiktif. Selanjutnya pihak kepolisian merujuk AA ke institusi penanganan adiksi komponen masyarakat Rumah Merah Putih untuk menjalani rehabilitasi. Setelah mengikuti 12 kali pertemuan, bersangkutan dinyatakan selesai menjalani rehabilitasi. Dia hanya disanksi SP 2, dan dipindah tugas ke kantor PDAM DC Waru. "Sanksinya berupa pemberian SP2. Kalau melakukan kesalahan lagi, baru di-SP3. Artinya diberhentikan sebagai karyawan PDAM," ujar staf PDAM. (hd)

➡ **CakraJatim.com**